

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kemiskinan merupakan masalah sosial yang senantiasa hadir di tengah-tengah masyarakat. Kemiskinan ditandai oleh keterbelakangan dan pengangguran yang selanjutnya meningkat menjadi pemicu ketimpangan pendapatan dan kesenjangan antar golongan penduduk. Kesenjangan dan pelebaran jurang antara si kaya dan si miskin tidak mungkin untuk terus dibiarkan karena akan menimbulkan berbagai persoalan, baik persoalan sosial maupun persoalan politik di masa yang akan datang.

Kemiskinan juga dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti sandang, pangan dan papan yang diukur dari sisi pengeluaran. Kemiskinan dapat dilihat berdasarkan indeks kedalaman kemiskinan, dimana indeks kedalaman kemiskinan merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata penduduk dari garis kemiskinan (Todaro dan Smith, 2016).

Oleh sebab itu, supaya kemiskinan di Indonesia tidak menjadi permasalahan yang terus berlanjut, maka pemerintah harus melakukan perannya dengan sebaik mungkin untuk mengatasi masalah kemiskinan. Salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah adalah dengan upaya pembangunan, baik dari segi ekonomi maupun fisik. Selain meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pemerintah juga harus berupaya untuk menekan inflasi. Hal ini dikarenakan apabila inflasi terlalu tinggi, maka kemampuan masyarakat untuk melakukan pembelian

terhadap suatu barang akan menurun, sehingga masyarakat tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya dan mereka akan berada pada kondisi miskin. Menurut Aruan dan Sriyono (2014) penanggulangan kemiskinan yang paling jitu adalah dengan menciptakan aktivitas ekonomi pada daerah guna menciptakan pertumbuhan ekonomi. Hal ini dikarenakan pertumbuhan ekonomi yang ada nantinya diharapkan dapat membuka lapangan kerja baru sehingga berkurangnya pengangguran yang ada, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang nanti akan dapat mengurangi kemiskinan yang ada.

Apabila lapangan kerja terbuka dengan luas, maka akan berakibat pada penyerapan tenaga kerja yang tinggi dan penduduk usia kerja dapat memperoleh pekerjaan dengan mudah. Hal ini tentu akan mengurangi jumlah pengangguran, khususnya pengangguran terbuka yang selama ini menjadi masalah kompleks terhadap kemiskinan. Selain itu, lapangan kerja juga harus memperhatikan upah minimum yang diberikan kepada pekerja. Hal ini dikarenakan upah menjadi salah satu faktor penentu seseorang untuk melakukan pekerjaan. Apabila pekerja merasa upah yang diberikan sesuai, maka mereka akan terus bekerja. Tetapi ketika merasa upah yang diberikan tidak sesuai untuk mencukupi kebutuhannya maka mereka memilih untuk meninggalkan pekerjaan tersebut dan mereka menjadi pengangguran (Zuhdiyaty, 2017).

Upaya lain yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi masalah kemiskinan adalah dengan melakukan perbaikan pada sumberdaya manusianya. Kualitas sumberdaya manusia dalam suatu wilayah dapat dilihat berdasarkan indeks pembangunan manusia yang meliputi pendidikan, kesehatan dan pengeluaran. Menurut Suryawati (2014) bahwa ada beberapa faktor yang

menentukan kemiskinan di suatu daerah, diantaranya adalah kurangnya keterampilan sumberdaya manusia di daerah itu sendiri. Oleh karena itu, pembangunan sumberdaya manusia harus benar-benar diperhatikan.

Kemiskinan menjadi masalah bagi seluruh wilayah di Indonesia, termasuk di Provinsi Jambi. Sampai saat ini, penduduk di Provinsi Jambi masih banyak yang hidup diantara garis kemiskinan. Hal ini tentu menyebabkan kesenjangan sosial yang terus menerus terjadi. Kemiskinan yang terjadi di Provinsi Jambi ini tentu tidak terlepas dari faktor-faktor yang mempengaruhi, seperti tingkat pengangguran terbuka, upah minimum provinsi (UMP), pertumbuhan ekonomi dan indeks pembangunan manusia (IPM) itu sendiri. Adapun jumlah penduduk miskin, tingkat pengangguran terbuka, UMP, pertumbuhan ekonomi, inflasi dan IPM di Provinsi Jambi selama tahun 2015-2019 dapat dilihat pada Tabel 1.1.

Tabel 1.1. Jumlah Penduduk Miskin, TPT, UMP, Inflasi, Pertumbuhan Ekonomi dan IPM di Provinsi Jambi Tahun 2015-2019

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (Ribu orang)	TPT (%)	UMP (Rupiah)	Pertumbuhan Ekonomi (%)	Inflasi (%)	IPM (%)
2015	311.56	4,34	1.710.000	4,50	0,07	68,89
2016	290.81	4,00	1.906.650	3,51	1,19	69,62
2017	286.55	3,60	2.063.948	4,62	0,05	69,99
2018	281.47	3,59	2.243.718	4,66	0,12	70,65
2019	274.32	3,92	2.423.889	4,31	0,11	71,26
Rata-rata	288.94	3,89	2.069.641	4,32	0,31	70,08

Sumber : BPS Provinsi Jambi (2015-2019)

Tabel 1.1. menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin di Provinsi Jambi selama tahun 2015-2019 rata-rata sebanyak 288.94 ribu orang. Jumlah penduduk miskin di Provinsi Jambi mengalami penurunan dari tahun ketahun. Jumlah penduduk miskin di Provinsi Jambi tertinggi pada tahun 2015 yaitu 311.56 ribu

orang. Selanjutnya pada tahun berikutnya jumlah penduduk miskin di Provinsi Jambi terus mengalami penurunan hingga 274.32 ribu orang ditahun 2019.

Selanjutnya tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Jambi selama tahun 2015-2019 cenderung mengalami penurunan. Tahun 2015 tingkat pengangguran terbuka sebesar 4,34%. Angka tingkat pengangguran terbuka tersebut terus mengalami penurunan sampai tahun 2018 menjadi 3,59%. Akan tetapi, pada tahun 2019 tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Jambi justru mengalami menjadi 3,92%. Naik turunnya tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Jambi diduga ada kaitannya dengan laju inflasi dan pertumbuhan ekonomi pada tahun-tahun tersebut.

Inflasi dan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jambi tahun 2015-2019 rata-rata inflasi di Provinsi Jambi sebesar 0,31% dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi sebesar 4,32%. Inflasi tertinggi terjadi pada tahun 2016 yaitu 1,19% dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 3,51%. Dalam pembangunan ekonomi ada juga saat-saat kegagalan pemerintah membangun ekonomi, kegagalan pertumbuhan ekonomi meretas kemiskinan cenderung disebabkan oleh gagalnya pemerintah dalam mengelola laju pertumbuhan ekonomi. Kegagalan pemerintah dalam mengatur sistem pemberian upah padahal upah adalah sumber penghasilan, bila sumber penghasilan turun atau tetap maka kesejahteraan juga turun atau tetap dan itu juga pasti mempengaruhi tingkat kemiskinan.

Kemudian UMP di Provinsi Jambi juga terus mengalami kenaikan selama tahun 2015-2019 dengan rata-rata UMP selama 5 tahun terakhir sebesar Rp.2.069.641,-/tahun. Sedangkan untuk rata-rata IPM di Provinsi Jambi selama lima tahun terakhir yaitu tahun 2015-2019 sebesar 70,08%. Berdasarkan hal

tersebut, maka IPM di Provinsi Jambi selama tahun 2015-2019 terus mengalami peningkatan. Menurut Prasetyoningrum dan Sukmawati (2018) bahwa IPM berpengaruh terhadap kemiskinan, dimana IPM dapat diukur berdasarkan kesehatan, pendidikan, dan standar hidup atau pendapatan dari penduduk di suatu daerah. Apabila IPM disuatu daerah tinggi, maka akan membawa perbaikan dalam pengembangan potensi diri yang kemudian menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi dengan meningkatnya pendapatan dan masalah kemiskinan akan teratasi dengan baik.

Tabel 1. menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin di Provinsi Jambi selama lima tahun terakhir cenderung menurun yang diiringi dengan penurunan tingkat pengangguran terbuka dan inflasi. Selain itu, jumlah penduduk miskin tersebut cenderung berkurang seiring dengan bertambahnya UMP, pertumbuhan ekonomi dan IPM di Provinsi Jambi. Hal ini menunjukkan bahwa Provinsi Jambi diduga secara perlahan telah berhasil mengurangi jumlah penduduk miskin, namun perlu diketahui apakah berkurangnya jumlah penduduk miskin tersebut sepenuhnya dipengaruhi oleh berkurangnya TPT dan inflasi, serta meningkatnya UMP, pertumbuhan ekonomi maupun IPM atau tidak.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang *“Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan di Provinsi Jambi”*.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana perkembangan kemiskinan, TPT, UMP, pertumbuhan ekonomi, inflasi dan IPM di Provinsi Jambi?
2. Bagaimana pengaruh TPT, UMP, pertumbuhan ekonomi, inflasi dan IPM terhadap kemiskinan di Provinsi Jambi?

1.3. Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui perkembangan kemiskinan, TPT, UMP, pertumbuhan ekonomi, inflasi dan IPM di Provinsi Jambi.
2. Untuk menganalisis pengaruh TPT, UMP, pertumbuhan ekonomi, inflasi dan IPM terhadap kemiskinan di Provinsi Jambi.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan menjadi bahan masukan dan pertimbangan bagi pemerintah Provinsi Jambi untuk melakukan upaya-upaya yang tepat agar kemiskinan di Provinsi Jambi dapat teratasi dengan baik.

2. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan menjadi suatu gagasan dan menambah pengetahuan peneliti dan pembaca mengenai ilmu pembangunan, khususnya yang berkaitan dengan masalah kemiskinan.

